

**STRATEGI HUMAS POLDA SUMSEL TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN
CITRA POSITIF PASCA DEMONSTRASI MAHASISWA SE SUMATERA
SELATAN PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat mencapai derajat

Sarjana Strata 1 (S1) Ilmu Komunikasi

Konsentrasi : Hubungan Masyarakat



Diajukan Oleh :

Gede Prayoga Apriando

07031281621082

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2019

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF

**"STRATEGI HUMAS POLDA SUMATERA SELATAN TERHADAP
UPAYA MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PASCA
DEMONSTRASI MAHASISWA SE SUMATERA SELATAN PADA
TANGGAL 24 SEPTEMBER 2019"**

Skripsi

Oleh :

GEDE PRAYOGA APRIANDO

07031281621076

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 09 November 2020**

Pembimbing :

1 Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

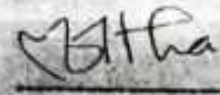
2 Miftha Pratiwi, S.J.Kom., M.I.Kom
NIP. 19920531201932018

Penguji :

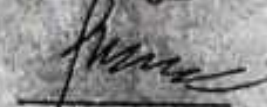
1 Dr. Hj. Retna Mahriani, M.Si
NIP. 196012091989122001

2 Erlisa Saraswati, S.KM., M.Sc
NIP. 199209132019032015

Tanda Tangan



Tanda Tangan



Dekan FISIP UNSRI,

Prof. Dr. Kgs. M. Sabri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Mengetahui



Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi,

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si
NIP. 197905012002121005

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLIKASI

1. Skripsi yang berjudul: "STRATEGI HUMAS POLDA SUMSEL TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PASCA DEMONSTRASI MAHASISWA SE SUMATERA SELATAN PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER" ini adalah penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik skripsi beserta gelar sarjana saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagai atau keseluruhan isi skripsi pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim promotor pembimbing sebagai *author* dan program studi Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya sebagai institusinya. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Palembang, 22 Oktober 2020



Gede Prayoga Apriando
NIM. 07031281621082

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Working hard is important, but there’s something that matters even more: believing in yourself”- Harry (Harry Potter and The Order Of Phoenix)

“Manner Maketh Man” – Harry (Kingsman The Golden Circle)

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua dan dosen pembimbing saya, serta teman-teman saya seperjuangan di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Sriwijaya angkatan 2016 yang telah mendukung dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Astungkare dengan segala puji dan syukur dari Ida Hyang Widi Wasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI HUMAS POLDA SUMSEL TERHADAP UPAYA MEMPERTAHANKAN CITRA POSITIF PASCA DEMONSTRASI MAHASISWA SE SUMATERA SELATAN PADA TANGGAL 24 SEPTEMBER”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tentunya atas dasar bimbingan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya serta rasa hormat yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, M.SCCE. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Kgs. M. Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Miftha Pratiwi, S.I.Kom, M. I. Kom selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan perhatiannya dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Farisha Sestri Musdalifah, M.Si selaku penguji I dan Ibu Erlisa Saraswaty, S.KPM, M.Sc selaku penguji II penelitian skripsi penulis, yang telah memberikan ilmu dan masukan yang berarti dalam penulisan Skripsi ini.
5. Seluruh Dosen jurusan Ilmu Komunikasi dan seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan berbagi ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu nya.
6. Bapak Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi dan Bapak Faisal Nomaini, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
7. Seluruh Staf Tata Usaha Jurusan Ilmu Komunikasi Kampus Indralaya yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaga dalam mengurus semua keperluan administrasi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Ilmu Komunikasi Angkatan 2016 yang telah berjuang bersama-sama dari awal semester hingga sekarang. Terimakasih atas waktu dan perjuangan yang telah kita lalui bersama baik didalam kelas maupun diluar kelas.

9. Kedua orang tua penulis ayah Made Suparma dan ibu Made Sri Astuti serta saudara penulis Kadek Pradnyanita Nadhira Putri yang selalu memberikan doa dan semangat dalam proses perkuliahan dan penulisan skripsi.
10. Kepada seluruh staf Humas Polda Sumatera Selatan yang telah memberikan tempat untuk mencari data yang diperlukan penulis.
11. Kepada rekan-rekan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya yang telah memberikan tempat untuk mengembangkan diri. “BGU, We Are One”
12. Kepada teman-teman “Sendal Petualang” yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk merasakan kekeluargaan di masa kuliah.
13. Kepada Marcelino Budi Kurnia, Imam Prayoga, Swarna Rahmat Putra, Cristina Vivid, Bernadetha Saptarini, Regina Munthe dan Nicho yang telah memberikan warna-warni masa kuliah penulis.
14. Kepada Annisa Ramayani, yang telah membantu untuk pengerjaan skripsi penulis serta memberikan saran-saran dalam penulisan.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung hingga terselesainya skripsi ini, dan segala kerendahan hati penulis memohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan yang ada, kritik dan saran senantiasa diharapkan untuk menjadikan awal yang lebih baik dikemudian hari. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan informasi serta manfaat yang berarti bagi pembacanya.

Palembang, 22 Oktober 2020

Penulis

Gede Prayoga Apriando

NIM. 07031281621082

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSYARATAN PUBLISITAS.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
ABSTRACT.....	xiii
DAFTAR BIMBINGAN.....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Banyak Demo Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa.....	6
1.1.2 Tindakan Represif yang Dilakukan Anggota Kepolisian dalam Mengamankan Unjuk Rasa 24 September 2019.....	8
1.1.3 Berita Hoax yang Menyerang Polda Sumatera Selatan Pasca Demonstrasi.....	9
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	11
1.4.2 Manfaat Praktis	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
2.2 Landasan Teori.....	14
2.3 Teori yang Digunakan.....	25
2.4 Kerangka Teori.....	26
2.5 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Desain Penelitian.....	34

3.2 Definisi Konsep.....	34
3.3 Fokus Penelitian.....	35
3.4 Unit Analisis.....	37
3.5 Unit Observasi.....	37
3.6 Informan.....	37
3.7 Data dan Sumber Data.....	38
3.8 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.9 Teknik Analisis Data.....	40
3.10 Teknik Keabsahan Data.....	40
BAB IV. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	40
4.1 Gambaran Umum Polda Sumatera Selatan.....	41
4.1.1 Sejarah Polda Sumatera Selatan.....	41
4.1.2 Visi dan Misi Polda Sumatera Selatan.....	46
4.1.3 Visi dan Misi Humas Polda Sumatera Selatan.....	47
4.1.4 Tujuan dan Fungsi Kepolisian.....	48
4.1.5 Makna Logo.....	49
4.1.6 Struktur Organisasi Bidang Humas Polda Sumatera Selatan.....	51
4.1.7 Tata Kelola Bidang Humas Polda Sumatera Selatan.....	52
BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	55
5.1 Strategi Humas Polda Sumatera Selatan dalam mempertahankan Citra Pasca Demonstrasi Mahasiswa.....	55
5.1.1 <i>Defining Public Relation Problems</i>	56
5.1.2 <i>Planning and Programming</i>	62
5.1.3 <i>Taking Action and Communication</i>	67
5.1.4 <i>Evaluating The Program</i>	76
5.2 Hasil dan Temuan Akhir.....	79
BAB VI PENUTUP.....	83
6.1 Kesimpulan.....	83
6.1.1 Dimensi <i>Defining Public Relation Problems</i>	84
6.1.2 Dimensi <i>Planning and Programming</i>	84
6.1.3 Dimensi <i>Taking Action and Communication</i>	85
6.1.4 Dimensi <i>Evaluating The Program</i>	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Berita Demo 24 September 2019.....	5
Gambar 2. Demo Mahasiswa Tentang Omnibus Law.....	7
Gambar 3. Pihak kepolisian bertindak represif saat demo.....	8
Gambar 4. Berita hoax yang memberitakan adanya korban pasca demo.....	10
Gambar 5. Model: Soleh Simirat & Elvinaro Ardianto.....	24
Gambar 6. Teori Strategi Humas Menurut Cutlip & Allen H. Center.....	25
Gambar 7. Kerangka Teori Cutlip & Allen. H Center pada Humas Polda Sumatera Selatan.....	31
Gambar 8. Logo Polda Sumatera Selatan.....	47
Gambar 9. <i>Hoax</i> meninggalnya mahasiswa demo.....	67
Gambar 10. <i>Hoax</i> meninggalnya mahasiswa demo.....	67
Gambar 11. <i>Press Release</i> Polda Sumatera Selatan.....	70
Gambar 12. Sosialisasi Polda Sumatera Selatan terkait.....	71
Gambar 13. Pelatihan wawancara yang dibentuk oleh Polda.....	73
Gambar 14. Polda mendapatkan <i>Adi Laksmana Award</i> dari IWO (Ikatan Wartawan Indonesia).....	73
Gambar 15. Klarifikasi Berita <i>Hoax</i> dari Liputan6.....	86
Gambar 16. Klarifikasi Berita <i>Hoax</i> dari Sripoku.....	86
Gambar 17. Klarifikasi Berita <i>Hoax</i> dari Sumeks.co.....	87
Gambar 18. Himbauan Meme dari Humas Polda.....	87
Gambar 19. Klarifikasi dari Kabid Humas Mengenai Berita <i>Hoax</i>	88
Gambar 20. Pihak Polda Mengecek mahasiswa yang dirawat.....	88

Gambar 21. Pejabat Umum Polda Melakukan Diskusi Bersama Mahasiswa.....	89
Gambar 22. Pihak Humas Polda Melakukan <i>Talkshow</i> bersama Mahasiswa di UIN Raden Fatah Palembang.....	89
Gambar 23. Humas melakukan Rapat Kordinasi Nasional TA 2019.....	90
Gambar 24. Pihak Polda Melakukan Pelatihan Kemampuan Multimedia bagi Anggotanya.....	90
Gambar 25. Wawancara terhadap Kabid Humas.....	94
Gambar 26. Wawancara Terhadap Kaur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	98

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 2.2 Teori Strategi Humas.....	18
Tabel 3.3 Fokus Penelitian.....	34
Tabel 5.1 Pengumpulan Data Gejala Masalah.....	55
Tabel 5.2 Pembahasan Data Gejala Masalah.....	58
Tabel 5.3 Tujuan Program.....	62
Tabel 5.4 <i>Action</i>	66
Tabel 5.5 <i>Communication</i>	69
Tabel 5.6 <i>Evaluator</i>	74
Tabel 5.7 Tahap Evaluasi.....	76

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Strategi Humas Polda Sumsel Terhadap Upaya Mempertahankan Citra Positif Pasca Demonstrasi Mahasiswa Se Sumatera Selatan Pada Tanggal 24 September", penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan Humas Polda Sumatera Selatan dalam mempertahankan citra pasca demonstrasi dan untuk melihat tahapan dalam pelaksanaan strategi yang dilakukan Humas Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori strategi humas oleh Cutlip & Allen H. Center untuk melihat strategi humas yang digunakan oleh pihak Humas Polda Sumatera Selatan dalam mempertahankan citra Polda Sumatera Selatan pasca demonstrasi mahasiswa melalui empat dimensi, yaitu *Defining Public Relations Problems, Planning and Programming, Taking Action and Communicating, Evaluating the Program*. Data yang digunakan berupa data primer yang didapat melalui wawancara mendalam terhadap narasumber yang berasal dari tim Humas Polda Sumatera Selatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa strategi yang digunakan pihak humas dalam mempertahankan citra Polda Sumatera Selatan yaitu dengan mengcounter berita *hoax* dengan menandai stempel *hoax* pada berita yang tidak benar tersebut serta memberitakan berita positif mengenai Polda Sumatera Selatan dan adanya sosialisasi untuk meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap Polda Sumatera Selatan.

Kata kunci: Humas Polda Sumatera Selatan, Citra, Strategi, Mempertahankan, *Hoax*

Pembimbing I



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II



Miftha Pratiwi, S.I.Kom, M. I. Kom.
NIP. 198802112019032011

Mengetahui,
Rektor Universitas Sriwijaya
Universitas Sriwijaya



Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

ABSTRACT

This research entitled "South Sumatra Regional Police Public Relations Strategy Against Efforts to Protect a Positive Image Post Student Demonstrations in South Sumatra on September 24", this research purpose to see the strategies carried out by the South Sumatra Regional Police Public Relations in protecting the post-demonstration image and to see the stages in the implementation of the strategies carried out by the South Sumatra Regional Police Public Relations. This research uses qualitative methods with descriptive analysis techniques. The theory used in this research is the PR strategy theory by Cutlip & Allen H. Center to see the PR strategies used by the South Sumatra Regional Police Public Relations in maintaining the image of the South Sumatra Regional Police after student demonstrations through four dimensions, namely Defining Public Relations Problems, Planning and Programming, Taking Action and Communicating, Evaluating the Program. The data used in the form of primary data obtained through in-depth interviews with sources from the South Sumatra Police Public Relations team. This research concludes that the strategy used by public relations in maintaining the image of the South Sumatra Regional Police is by counting hoax news by marking hoax stamps on the untrue news and reporting positive news about the South Sumatra Regional Police and socialization to increase public trust in the South Sumatra Regional Police.

Key words: South Sumatra Police Public Relations, Image, Strategy, Protecting, Hoax.

Pembimbing I

Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

Pembimbing II

Miftha Pratiwi, S.I.Kom, M. I. Kom.
NIP. 198802112019032011



Mengetahui,
Dekan Jurusan Ilmu Komunikasi
Universitas Sriwijaya
Dr. Andries Lionardo, S.IP., M.Si.
NIP. 197905012002121005

DAFTAR BIMBINGAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
 Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
 Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gede Prayoga Apriando
NIM : 07031281621082
Jurusan/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi humas polda sumsel terhadap upaya mempertahankan citra positif pasca demonstrasi mahasiswa se sumatera selatan pada tanggal 24 september 2019.

Pembimbing I : Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
5.	9/1-21/19	- Aca Kelapa - Aca peramb. lumen	A
6.	22/1-22/19	- Analisis Opa - Data digital + media - Data digital foto - Data digital video - Data digital audio - Data digital gambar	A
7.	24/1-21/19	- Cek temuan - cek laporan polisi - perbaiki data - koreksi	A

8. 28/1-21/19 Aca copy

Palembang,
 Mengentahui,
 Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dr. Andries Lionardo, S.IP,
 M.Si.NIP. 19790501200212100



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
Jalan Palembang-Prabumulih, KM 32 Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir 30662
Telepon (0711) 580572 ; Faksimile (0711) 580572

DAFTAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Gede Prayoga Apriando
NIM : 07031281621082
Jurusan/Fakultas : Ilmu Komunikasi/Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi humas polda sumsel terhadap upaya mempertahankan citra positif pasca demonstrasi mahasiswa se sumatera selatan pada tanggal 24 september 2019.

Pembimbing II : Miftha Pratiwi, S.I.Kom, M.I.Kom.

No.	Tanggal	Keterangan	Paraf
1	12 Agustus 20	Matrices	
2	19 Oct 2020	Bab 4 + 5	

Palembang,
Mengentahui,
Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi

Dr. Andries Lionardo, S.IP,
M.Si.NIP. 19790501200212100

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk dari komunikasi massa yang dilakukan oleh suatu kelompok yang memiliki kepentingan didalamnya. Kepentingan tersebut akan disampaikan pada saat demonstrasi tersebut, kepentingan tersebut dapat berupa tuntutan yang dilakukan oleh kelompok tersebut pada saat melakukan demonstrasi. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 9 tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, tepatnya berada pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi sebagai berikut, “Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran”.

Secara teoritis, unjuk rasa atau demonstrasi merupakan salah satu bentuk partisipasi politik. Gabriel A. Almond mengidentifikasi unjuk rasa sebagai partisipasi politik inkonvensional. Hal tersebut dibedakan dengan partisipasi konvensional, seperti halnya memberikan suara dalam pemilu, diskusi politik, kampanye, membentuk dan bergabung dengan kelompok kepentingan, serta berkomunikasi secara individual dengan pejabat publik atau administratif. (Prianter, 2012: 120)

Semakin maju suatu masyarakat “ekspresi dalam unjuk rasa” akan semakin beragam; dari melakukan mogok makan hingga melakukan pemboman atau pengrusakkan tempat umum. Dapat dikatakan bahwa “aksi unjuk rasa” merupakan instrumen atau cara anggota atau sekelompok masyarakat untuk menunjukkan atau menyatakan ketidaksetujuan terhadap suatu pandangan, pemikiran, sikap atau tindakan tertentu anggota atau kelompok masyarakat lain. Aksi unjuk rasa juga merupakan instrumen penting bagi masyarakat dalam menyalurkan kepeduliannya terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama pada saat hasil dan proses pembangunan dinilai tidak sejalan dengan amanat konstitusi yang telah dibuat tersebut.” (Pranadji, 2016: 133)

Di Indonesia sendiri, unjuk rasa telah terjadi sejak lama. Salah satu bentuk unjuk rasa yang pernah terjadi ialah pada tahun 1998, saat itu dengan tuntutan untuk menjatuhkan rezim orde baru menjadi rezim reformasi. Berbagai kalangan masyarakat ikut bergabung dalam unjuk rasa tersebut. Unjuk rasa dimulai dari kritik para mahasiswa terhadap Pemerintahan yang tidak sehat. Setelah kejadian tersebut dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan berpendapat di muka umum yang tertera dalam Undang-Undang No. 9 Tahun

1998. Dalam Undang-Undang tersebut, Pemerintah melindungi masyarakat dalam menyampaikan pendapatnya dimuka umum tanpa adanya tekanan dari pihak manapun secara bebas, tetapi dalam menyampaikan pendapat tersebut para perunjuk rasa dilarang untuk merusak fasilitas umum yang berada di tempat perunjuk rasa serta berbagai aturan lainnya dalam unjuk rasa tersebut. Hal ini telah di atur dalam UU No. 9 Tahun 1998 dalam Bab IV.

Sejak dari demonstrasi 1998 tersebut, mahasiswa menjadi lebih sering mengkritik Pemerintah dengan cara berunjuk rasa. Telah banyak unjuk rasa yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan tuntutan yang berbagai macam cara. Unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa juga banyak fasilitas-fasilitas umum yang mengalami kerusakan, hal tersebut diakibatkan oleh unjuk rasa yang ricuh.

Dalam mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut, kepolisian memiliki kewajiban untuk menghormati standar dan prinsip HAM bagi setiap kelompok baik itu kelompok yang melakukan demonstrasi atau kelompok yang berada di Pemerintahan. Bahwa prinsip dan standar HAM yang wajib dihormati oleh aparat kepolisian terkait pengamanan aksi unjuk rasa, antara lain yaitu: Prinsip kebebasan berpendapat, Prinsip-prinsip yang tertera dalam Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Ketentuan Berperilaku bagi Penegak Hukum, serta Prinsip-prinsip Dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh Aparat Penegak Hukum Tahun 1980 (Prianter, 2012: 129)

Berdasarkan dari prinsip dan standar HAM yang harus dihormati tersebut, anggota kepolisian harus memberikan pelatihan terhadap anggotanya supaya dapat mengamankan jalannya unjuk rasa dengan baik tanpa adanya HAM yang dilanggar. Dalam memberikan pelatihan tersebut pihak Humas Polda dapat mengkordinir bentuk-bentuk pelatihan yang akan diberikan kepada anggotanya. Seperti halnya materi tentang pengamanan unjuk rasa yang tidak memperbolehkan menggunakan senjata api dalam mengamankan unjuk rasa tersebut.

Selain mengadakan pelatihan terhadap anggotanya, Humas Polda juga dapat melakukan konferensi pers untuk membentuk citra positif terhadap publiknya. Dengan melakukan konferensi pers tersebut dapat menghalau berita-berita negatif yang akan menyerang polda. Khususnya pasca ada berita mengenai penyerangan terhadap anggota unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 24 September tersebut.

Sebelum mengenal lebih dalam mengenai tugas-tugas praktisi humas di kepolisian, sebaiknya mengetahui definisi terlebih dahulu dari humas tersebut. Definisi humas dapat diterjemahkan menjadi, fungsi manajemen yang telah direncanakan sebelumnya dan dapat dijalankan secara berkesinambungan oleh setiap lembaga-lembaga umum, organisasi dan perusahaan ditujukan untuk memperoleh dan membuat adanya saling pengertian diantaranya guna mencapai kerja sama yang lebih produktif didalamnya, dan untuk memenuhi kepentingan bersama. Hal tersebut dapat terjadi jika adanya perencanaan yang sangat matang dari seorang humas.

International Public Relations Association (IPRA) memberi definisi PR karena pada tahun 1960 sudah muncul ribuan definisi. Definisi PR yang telah disepakati para ahli yang telah bergabung dalam IPRA di Den Haag, Belanda itu menyatakan dengan tegas bahwa PR adalah fungsi manajemen, artinya PR tersebut akan selalu melekat dengan fungsi manajemen. Hal ini secara tidak langsung menyeragamkan definisi yang telah begitu banyak sebelumnya, dalam hal hubungan antar PR dengan manajemen yang beraneka ragam. (Sari, 2017: 6)

Berdasarkan pada definisi PR tersebut, ada 5 persyaratan yang mendasar bagi PR untuk menjalankan fungsi PR yaitu:

1. *Ability to communicate* (kemampuan untuk berkomunikasi),
2. *Ability to organize* (kemampuan untuk manajerial),
3. *Ability to get on with people* (kemampuan untuk bergaul),
4. *Personality Integrity* (memiliki kepribadian jujur),
5. *Imagination* (banyak ide dan kreatif). (Sari, 2017: 7)

Sedangkan menurut Cutlip-Center-Broom telah mendefinisikan PR sebagai *the planned effort to influence opinion through good character and responsible performance, based on mutually satisfactory two-way communications* (usaha yang terencana untuk mempengaruhi pandangan melalui karakter yang baik serta tindakan yang bertanggung jawab, didasarkan atas komunikasi dua arah yang saling memuaskan). (Morrisan, 2014: 7)

Berdasarkan pada pengertian tersebut, seorang PR yang profesional harus dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang menyerang lembaga atau instansi tempat PR tersebut bekerja. Baik itu permasalahan secara internal maupun secara eksternal yang sedang menyerang lembaga atau instansi tersebut.

Permasalahan internal merupakan permasalahan yang terjadi didalam suatu lembaga atau instansi tersebut. Contohnya seperti permasalahan kurangnya komunikasi antara bawahan dan atasan, hal ini dapat membuat suatu lembaga atau instansi terlihat tidak kompak didalamnya yang nantinya akan mengancam keberlangsungan lembaga atau instansi tersebut. Maka dari itu, sosok seorang PR dapat menjembatani antara atasan dan bawahan serta membuat keberlangsungan instansi atau lembaga tersebut menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Sedangkan pada permasalahan eksternal merupakan permasalahan yang terjadi diluar lembaga instansi tersebut. Contohnya seperti permasalahan buruknya citra suatu lembaga atau instansi di mata publiknya. Hal ini membuat kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga atau instansi yang memiliki citra yang buruk di publiknya. Dalam permasalahan ini, akan sangat mengancam keberlangsungan suatu lembaga atau instansi tersebut. Maka dari itu, sosok seorang PR dapat membentuk citra positif bagi lembaga atau instansi tersebut untuk mengembalikan kepercayaan publiknya terhadap instansi atau lembaga tersebut.

Dalam penelitian ini akan dibahas tentang permasalahan yang terjadi pada lembaga kepolisian daerah Sumatera Selatan terkait dengan pasca demonstrasi 24 September 2019. Dalam permasalahan ini pihak polisi melakukan pengamanan terhadap gedung DPRD Palembang, tetapi pengamanan tersebut telah membuat ricuh antara polisi dan mahasiswa yang memaksa masuk ke daerah lingkungan gedung DPRD Palembang. Alhasil, setelah ricuh tersebut terjadi ada sekitar 28 mahasiswa harus dibawa ke IGD Rumah Sakit Charitas untuk mendapatkan pertolongan setelah ditembakkannya gas air mata terhadap kelompok mahasiswa yang memaksa masuk ke lingkungan gedung DPRD.



Gambar 1. Berita Demo 24 September 2019

Unjuk rasa tersebut tidak hanya terjadi di Palembang saja, tetapi terjadi secara serentak diberbagai kota di Indonesia. Dengan satu tuntutan yang sama. Unjuk rasa ini terjadi karena adanya suatu fenomena yang tidak baik-baik saja di Pemerintahan yang telah memaksa mahasiswa untuk melakukan unjuk rasa tersebut. Setelah unjuk rasa tersebut usai, para mahasiswa merasa kurangnya rasa percaya terhadap pihak kepolisian, dikarena melakukan pengamanan yang membuat keadaan saat unjuk rasa menjadi ricuh dengan menembakkan gas air mata. Para mahasiswa menilai bahwa pihak kepolisian sedang memihak Pemerintah, yang seharusnya dalam hal seperti ini kepolisian tidak memihak siapapun atau bersikap netral. Bahkan presma Unsri hampir di culik oleh orang tidak dikenal pasca demonstrasi mahasiswa tanggal 24 September 2019 tersebut, hal ini telah dimuat dalam SRIPOKU.com.

Melihat fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah riset mengenai strategi Humas Polda Sumsel terhadap upaya mempertahankan citra positif pasca demonstrasi mahasiswa se-Sumatera Selatan pada tanggal 24 September 2019. Citra dari kepolisian tersebut sedang mengalami kurangnya rasa percaya dari pihak mahasiswa yang diakibatkan dari tindakan pengamanan dari pihak kepolisian yang represif. Hal ini sampai menimbulkan korban luka-luka setelah demonstrasi tersebut terjadi.

Alasan penelitian tersebut terdiri dari dua poin diantara adalah banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya dan tindakan represif yang dilakukan anggota kepolisian dalam mengamankan jalannya unjuk rasa mahasiswa 24 September 2019.

1.1.1 Banyaknya Demo Yang Telah Dilakukan Oleh Mahasiswa

Berdasarkan unjuk rasa diatas merupakan contoh aksi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membela masyarakat yang haknya telah ditindas oleh pemerintah. Jika, kelompok mahasiswa telah melakukan aksi demonstrasi maka adanya suatu tuntutan yang harus disampaikan kepada pihak yang di demo tersebut. Ada banyak aksi unjuk rasa yang telah dilakukan oleh masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya, seperti halnya pada demonstrasi yang baru-baru ini terjadi tentang “gagalkan aksi Omnibus Law”.

Dalam demonstrasi ini pihak mahasiswa telah belajar dari aksi demonstrasi sebelumnya yaitu dari demonstrasi 24 September 2019 lalu yang mana demonstrasi pada saat itu terjadi dengan anarkis dan adanya korban luka-luka dari demonstrasi tersebut. Tetapi pada

saat demonstrasi yang baru terjadi akhir ini, pihak mahasiswa tidak melakukan tindakan yang anarkis tetapi memang adanya oknum yang mau membuat suasana demo tersebut menjadi kacau. Tindakan anarkis yang dilakukan pada saat demonstrasi tersebut biasanya di dalangi oleh oknum yang bukan berasal dari kalangan mahasiswa melainkan dari orang-orang yang memiliki kepentingan untuk membuat kekacauan.



Gambar 2. Demo Mahasiswa Tentang Omnibus Law

Pada demo tentang omnibus law tersebut, pihak kepolisian telah dengan baik mengamankan jalannya aksi demo tersebut, alhasil aksi demo tersebut terjadi dengan damai walaupun di hari pertama demo terjadi tindakan represif dari pihak kepolisian tetapi tidak menimbulkan korban luka-luka dibandingkan dengan pada demo pada tanggal 24 September 2019 dahulu. Pihak kepolisian juga telah belajar dari pengalaman demo dahulu, pengawalan demo pada masa sekarang telah kondusif yang mana pihak kepolisian membuat barikade duri-duri untuk menjaga kantor DPRD tempat mahasiswa melakukan aksi demo dengan barikade tersebut membuat mahasiswa tidak dapat memaksa masuk ke lapangan DPRD dan tidak adanya tindakan anarkis yang terjadi pada aksi demo tersebut.

Tindakan Represif Yang Dilakukan Anggota Kepolisian Dalam Mengamankan Unjuk Rasa 24 September 2019.

Pada saat demo tanggal 24 September 2019 terjadinya tindakan represif dari anggota kepolisian dalam mengamankan terjadinya unjuk rasa yang dilakukan oleh pihak mahasiswa di depan gedung DPRD Palembang. Tindakan represif itu dimula saat mobil komando mahasiswa yang memaksa masuk ke area gedung DPRD. Pihak kepolisian langsung melakukan tindakan represif dalam mengamankan gedung DPRD tersebut, berawal dari aksi damai yang dilakukan para mahasiswa dan diakhiri dengan kericuhan yang terjadi antara pihak kepolisian dan pihak mahasiswa itu sendiri.

Hal ini dikarenakan adanya tindakan represif yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam mengamankan demo tersebut, padahal tidak adanya tindakan represif yang dilakukan oleh pihak mahasiswa pada awalnya tetapi memaksa masuk ke lingkungan gedung DPRD yang memicu tindakan represif itu terjadi. Setelah itu pihak kepolisian menembakkan gas air mata dan *water cannon* untuk membubarkan kerumunan mahasiswa yang sedang melakukan demo tersebut. Alhasil, para mahasiswa melarikan diri dari tempat unjuk rasa tersebut dan berlarian masuk ke dalam mall terdekat dari gedung DPRD tersebut. Akibat dari tindakan yang represif tersebut, ada setidaknya 28 mahasiswa yang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.



Gambar 3. Pihak kepolisian bertindak represif saat demo

1.1.2 Berita Hoax yang Menyerang Polda Sumatera Selatan Pasca Demonstrasi

Berdasarkan gambar 1 tersebut, merupakan salah satu demo yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang dibalas represif dari pihak kepolisian dalam

mengamankan aksi demonstrasi tersebut. Pihak kepolisian menggunakan gas air mata dan melakukan aksi saling dorong terhadap mahasiswa yang sedang melakukan demonstrasi.

Pada kasus ini, mahasiswa sedang melakukan unjuk rasa terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh DPR tentang pelemahan KPK, bermasalahnya RKUHP dan UU ITE yang mengancam demokrasi serta RUU pertanahan, RUU minerba dan RUU SDA yang tidak berpihak pada rakyat. Begitu banyaknya tuntutan yang dilakukan oleh mahasiswa yang menandakan bahwa Pemerintah sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Oleh karena itu mahasiswa hadir di tengah-tengah persoalan tersebut untuk membenarkan Pemerintah yang sedang tidak berada pada alurnya. Aksi tersebut dilakukan serentak di beberapa kota di Indonesia salah satunya berada di Palembang, Jogja, Jakarta, Medan, Bandung dan daerah lainnya.

Dari unjuk rasa hampir di tiap-tiap kota tersebut, terdapat kekerasan yang dilakukan anggota kepolisian dalam mengamankan jalannya unjuk rasa tersebut. Salah satunya berada di kota Palembang yang alhasil menimbulkan korban luka-luka yang langsung di bawa ke RS Charitas untuk mendapatkan pertolongan. Korban luka-luka tersebut berjumlah 28 orang.

Setelah aksi unjuk rasa tersebut, banyak sekali *hoax-hoax* bermunculan yang sedang menyerang Polda Sumsel. Salah satu bentuk *hoax* nya adalah berita tentang adanya korban jiwa akibat dari unjuk rasa tersebut. *Hoax* tersebut membuat para orang tua khawatir terhadap anaknya yang ikut dalam unjuk rasa tersebut dan membuat rasa ketidakpercayaan terhadap anggota kepolisian tersebut.

Jika *hoax* tersebut tidak segera diselesaikan oleh pihak Humas Polda, maka akan adanya bentuk-bentuk rasa dendam terhadap pihak kepolisian tersebut. Hal tersebut dapat mengancam kepolisian itu sendiri serta dapat membuat citra Polda Sumsel menjadi jelek di mata para masyarakatnya. Oleh karena itu, pihak Humas Polda dengan cepat mencari informasi yang akurat mengenai *hoax* tersebut. Alhasil, berita tersebut memanglah *hoax* semata yang ditujukan untuk membuat kondisi semakin kacau.



Gambar 4. Berita hoax yang memberitakan adanya korban pasca demo

Setelah didapatkannya masalah dalam penelitian ini maka citra dari Polda Sumatera Selatan dapat tercoreng, jika permasalahan *hoax* ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Dengan teori yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini maka dapat diketahui strategi yang digunakan Polda Sumatera Selatan dalam menjaga citra pasca demonstrasi mahasiswa tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi Humas Polda Sumsel dalam mempertahankan citra pasca demonstrasi mahasiswa se-Sumatera Selatan tanggal 24 september 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi yang dilakukan Humas Polda Sumsel dalam mempertahankan citra pasca demonstrasi mahasiswa se-Sumatera Selatan tanggal 24 September 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik secara konsep maupun teori yang berkaitan dengan strategi Humas Polda Sumsel dalam mempertahankan citra pasca demonstrasi mahasiswa se-Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan gambaran nyata dalam pengembangan dan penerapan ilmu serta dapat memberikan kritikan dan saran kepada para pembentuk keputusan di Humas Polda Sumsel dalam mempertahankan Citra lembaganya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Dini Salmiyah Fithrah. 2015. *Marketing Public Relations –Diantara Penjualan dan Pencitraan*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Alma, Buchory dan Saladin, Djaslim. 2010. *Manajemen Pemasaran: Ringkasan Praktis, Teori, Aplikasi dan Tanya Jawab*. Bandung: CV. Linda Karya.
- Cutlip, Scott M., Allen H. Center. 2017. *Effective Public Relations*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Frida, Kusumastuti. 2002. *Dasar-Dasar Humas*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Franks Jefkins, 2004. *Public Relations*. Jakarta: PT. Gelors Aksara Pertama Erlangga.
- Indahingwati, Asmara. 2019. *Kepuasan Konsumen Pada Kualitas Layanan SIM Keliling*. Surabaya: CV. Jakad.
- Idrus, M. 2009. *Metode penelitian Ilmu Sosial*. Yogyakarta: PT. Gelora Akasara Pratama.
- Irianta, Yossial. 2004. *Manajemen Strategi Public Relations*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rhenald Kasali . 2017. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Kriyantono, Rachmat. 2009. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Malang: Prenada Media Group.
- Kustadi, Suhandang. 2004. *Public Relations Perusahaan*. Bandung: Karya Nusantara.
- Morissan. 2014. *Manajemen Public Relations: Strategi Menjadi Humas Profesional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mukarom, Zainal, dkk. 2015. *Manajemen Public Relations: Panduan Efektif Pengelolaan Hubungan Masyarakat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nurtjahjani, F., dan Trivena, S. M. 2018. *Public Relations Citra dan Praktek*. Malang: UPT Percetakan dan Penerbitan Polinema.
- Ruslan, Rosady. 2010. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers

Ruslan, Rosady. 2014. Manajemen *Public Relations* Dan Media Komunikasi Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sari, Anditha. 2017. Dasar-dasar *Public Relations* Teori dan Praktik. Yogyakarta: CV Budi Utama.

Seitel, Fraser. 2007. *The Praticce of Public Relations*. Boston: Pearson Education International.

Tayibnapis. 2006. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

JURNAL

Hairi,Prianter Jaya, (2012). Prinsip Standar HAM Dalam Pengamanan Unjuk Rasa.<https://jurnal.dpr.go.id>. Vol. 3 no. 1. Hal. 115-132.

Iman Mukhroman dan Rangga Galura Gumelar. (2013). Perencanaan Strategi Humas Pemprov Banten Pasca Ditetapkannya Kep. Pariwisata Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. <http://jurnal.unpad.ac.id/>. Vol. 1, No. 3.207-217.

Pranadji,Tri. (2008). Aksi Unjuk Rasa (Dan Radikalisme) Serta Penanganannya dalam Alam "Demokrasi" Di Indonesia. Forum Penelitian Agro Ekonomi.Vol. 26 no. 2. Hal. 132-143.

Sularso, Aji. (2006). Profesionalisme Humas Dalam Menghadapi Tantangan. Komunika: Warta Ilmiah Populer Komunikasi Dalam Pembangunan Vol. 9 No. 2. Hal. 21-31.